

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat sejak PJP I, walaupun beberapa tahun terakhir ini gerak tersebut nampak melambat. Perkembangan ekonomi ini juga disertai dengan perubahan struktur ke arah lebih non agraris. Peranan sektor industri dan jasa meningkat secara cukup berarti, sementara sektor pertanian secara relatif mengalami penurunan kontribusi dalam produk nasional. Pergeseran peranan sektoral ini juga diikuti dengan perubahan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Daya serap sektor pertanian melemah dan posisinya secara bertahap diambil alih sektor non pertanian.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai selama 25 tahun era Orde Baru, proses transformasi struktural perekonomian nasional telah dan akan terus berlanjut mengarah pada struktur perekonomian yang semakin berimbang seperti yang dicita-citakan. Transformasi tersebut telah mengakibatkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dimana peran relatif pertanian dalam perekonomian nasional agak menurun, karena semakin kecil sumbangan terhadap PDB nasional, penyerapan tenaga kerja dan ekspor bahan mentah, diimbangi oleh perkembangan yang pesat di sektor industri manufaktur dan jasa (Saragih, 2006).

Secara nasional, pembangunan yang sedang berlangsung dewasa ini dicirikan oleh adanya berbagai tujuan, sebagaimana tersirat di dalam Garis-saris Besar Haluan Negara. Tujuan pembangunan nasional tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek pemerataan pendapatan masyarakat dan aspek kesempatan kerja serta kelestarian sumberdaya potensial.

Diantara sumberdaya potensial (Randall, 1981) tersebut, ada yang berupa sumberdaya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan sumberdaya buatan (*man-made resources*). Sejalan dengan kerangka tujuan tersebut, maka upaya-upaya pembangunan sumberdaya yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari pada pembangunan nasional seyogyanya juga memperhatikan aspek-aspek tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Ini berarti bahwa upaya tersebut perlu dilakukan secara rasional dan bijaksana.

Pembangunan ekonomi nasional di era ini dititikberatkan pada pemantapan pengembangan industri nasional dengan penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung oleh kemampuan teknologi yang semakin meningkat, peningkatan ketangguhan pertanian, pemantapan sistem kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi dan pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumberdaya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Amang dan Sawit, 2007).

Tantangan eksternal perekonomian yaitu perdagangan dunia dalam era globalisasi membawa dampak yang cukup besar baik di negara maju maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Usman, 1996 menyatakan bahwa muncul kecenderungan perdagangan dunia sepuluh tahun kedepan, diantaranya : (1) pangsa perdagangan bahan mentah terus menurun sedangkan pangsa pasar produk manufaktur masih akan terus meningkat, (2) perdagangan produk manufaktur semakin terkonsentrasi pada mesin, alat pengangkutan, alat komunikasi dan termasuk komponen-komponennya, (3) perdagangan antar-industri semakin penting peranannya, (4) pangsa perdagangan yang berkaitan dengan investasi asing langsung naik, terutama yang merupakan perdagangan intra-perusahaan, (5) peranan perdagangan antar negara industri masih dominan dalam perdagangan dunia, (6) pangsa pasar kawasan Asia Timur akan terus menguat dan (7) kegiatan perdagangan intra-kawasan akan naik lebih cepat dibandingkan dengan perdagangan extra-kawasan (Pakpahan, 2004).

Pada era tersebut sektor pertanian sebagai salah satu pendukung perekonomian nasional akan senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan strategis dan kondisi sumberdayanya, sehingga tetap dapat mempertahankan peran strategisnya. Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) sektor pertanian telah berperan sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketangguhan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu tersebut pertanian mampu menjadi katup pengaman dalam penyediaan sebagian besar kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan penerimaan devisa, dan penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh

penduduk, dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 (Kompas, 2008; Musa, 2009 dan Amang, B. 2005).

Peran pertanian yang sangat penting tersebut akan semakin diuji pada masa mendatang, khususnya dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan global dan semakin terbatasnya sumberdaya alam yang selama ini merupakan input fisik yang masih sangat mudah diperoleh (Pakpahan, 2004). Tugas berat pertanian itu hanya akan dipikul manakala pertanian dapat terus tumbuh secara akseleratif. Sementara itu potret yang ada mencatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian relatif lambat dan transformasi struktur perekonomian dari dari yang basis pertanian ke industri belum diikuti oleh pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Peran relatif sektor pertanian terhadap PDB telah menurun dari 24,01 persen pada 1983 menjadi 17,88 persen pada 1993 dan diperkirakan akan terus menurun hingga 12,03 persen pada 2003. Sebaliknya, sumbangan sektor industri ke PDB meningkat dari 11,14 persen pada 1983 menjadi 22,30 pada 1993 dan diperkirakan sebesar 41,03 persen pada 2003. Dalam pada itu, penyerapan tenaga kerjanya relatif tidak seimbang, yaitu 54,66 persen pada 1983 menjadi 50,59 persen pada 1993 di sektor pertanian dan dari 10,02 persen pada 1983 menjadi “hanya” 11,63 persen di sektor industri (Muhtadi, 1999) dan Siagian, 2004). Keadaan ini menyebabkan terus berkembangnya *dualisme* atau kesenjangan, baik sektoral, spasial, maupun pelaku-pelaku di sektor pertanian. Sementara itu perkembangan lingkungan global strategik menghendaki pula adanya penyesuaian strategi pengembangan sektor pertanian (Kompas, 2004).

Masa lalu memberikan gambaran bahwa meskipun lebih dari tiga dekade, tetapi potret pertanian masih tetap belum berubah (Muhtadi, 1999). Sektor pertanian masih menjadi tumpuan dimana sampai dengan tahun 1995 sekitar 44 %; tahun 1997 40,73% tenaga kerja terkonsentrasi di sektor pertanian. Sementara sumbangannya terhadap PDB semakin menurun menjadi sekitar 17,3% di tahun 1994 dan 14,81 % di tahun 1997. Kondisi ini selain memberikan gambaran bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian masih rendah, juga memberikan gambaran bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang “berkewajiban” menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia.

Berbagai hambatan produksi padi masih terus dialami petani, mulai dari tersendatnya distribusi pupuk, jeleknya transportasi di usahatani, terbengkalainya saluran irigasi, saluran pembuangan air, trauma gagal panen akibat serangan hama wereng dan tikus dan rasa keterasingan petani akibat pengabaian peran pemerintah daerah dan pusat. Selain itu menurut FAO pasar internasional juga tidak bisa diandalkan karena meskipun pasokan pangan mulai bertambah, tetapi harga pangan tidak turun. Apabila Indonesia mengandalkan ketersediaan pangan dengan cara impor, akan mendapatkan harga pangan yang cukup mahal. (Kompas, September 2011).

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui potensi usahatani padi di wilayah sentra padi kabupaten Jember dan kabupaten Lumajang sebelum dan sesudah adanya program kebijakan pemerintah
2. Mengetahui efisiensi ekonomi usahatani padi pada program SLPTT di kabupaten Jember dan program SLPHT di kabupaten Lumajang
2. Mengetahui kelayakan teknologi budidaya sebagai alternatif upaya peningkatan keuntungan petani usahatani padi di kabupaten Jember
3. Mengetahui nilai tukar petani padi di wilayah sentra padi di Kabupaten Jember dan kabupaten Lumajang.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan informasi tentang potensi wilayah usahatani padi baik di kabupaten Jember maupun Lumajang
2. Memberikan informasi tentang efisiensi teknis usahatani padi pelaksanaan program SLPTT di kabupaten Jember dan program SLPHT di kabupaten Lumajang
3. Memberikan informasi kelayakan teknologi usahatani padi pada program SLPTT di kabupaten Jember
4. Memberikan gambaran nilai tukar petani padi di kabupaten Jember dan kabupaten Lumajang.